

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi politik bagi para politisi untuk berkomunikasi secara bebas dengan masyarakat tanpa perlu perantara media konvensional (Arsyad, 2024). Di era media sosial, *platform* digital tidak hanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi secara masif, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan, membangun kedekatan dengan publik, dan menunjukkan kinerja. Fenomena ini menandai pergeseran pola komunikasi politik dari model satu arah yang kaku menuju pola interaksi yang lebih personal dan partisipatif.

Realitas politik yang terjadi mendorong aktor politik untuk tampil secara proaktif di media sosial. Terutama bagi lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi representasi (Pisma, 2024). DPR dan DPRD memiliki peranan strategis sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan konstituen melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan tersebut membutuhkan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat mengetahui, menilai, serta mengawasi kinerja wakil rakyat secara terbuka (Machmudi, 2026).

Namun, dalam implementasinya banyak masyarakat yang meragukan eksistensi dari perwakilan rakyat mereka. Salah satu faktornya adalah kurangnya transparansi kinerja, komunikasi publik yang buruk dan kerap munculnya pemberitaan negatif (Syam, 2026). Terbukti dari survei Indikator Politik Indonesia (2026) menyatakan bahwa lembaga legislatif memperoleh tingkat kepercayaan

publik paling rendah dibandingkan lembaga lain sebesar 56%.

Kondisi tersebut turut menjadi tantangan bagi lembaga legislatif di daerah, yaitu DPRD Kota Payakumbuh dalam memenuhi keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pra wawancara dengan Ketua DPRD Kota Payakumbuh, WP menyampaikan bahwa dalam optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana transparansi masih belum dilakukan secara menyeluruh dan terus menjadi bahan evaluasi. Saat ini, DPRD Kota Payakumbuh sudah mulai memanfaatkan *platform* Instagram untuk mempublikasikan kegiatan reses, rapat, serta kunjungan lapangan dengan format foto dan video pendek.

Di tengah upaya memaksimalkan komunikasi melalui media sosial, anggota DPRD Kota Payakumbuh juga berada dalam lingkungan komunikasi politik digital yang mempertemukan mereka dengan berbagai praktik komunikasi yang ditampilkan oleh politisi lain. Berbagai konten politik dikemas secara lebih kreatif, interaktif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat membuat penyebarannya lebih luas (Suryawati, 2021). Situasi ini membuka ruang bagi anggota DPRD Kota Payakumbuh untuk mengamati dan memakani bagaimana komunikasi politik yang berkembang di media sosial yang nantinya akan disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat.

Salah satu figur politik yang kerap muncul di algoritma media sosial anggota DPRD Kota Payakumbuh adalah Dedi Mulyadi atau yang lebih dikenal dengan KDM (Kang Dedi Mulyadi). Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sosoknya dikenal secara luas oleh publik karena aktif mengunggah berbagi

kegiatannya melalui kanal pribadinya di Youtube. Dedi Mulyadi secara konsisten menampilkan konten yang berfokus kepada kunjungan secara langsung atau blusukan untuk menolong masyarakat yang sedang kesulitan finansial, sosial maupun hukum. Konten yang ditampilkan seringkali memperlihatkan intervensi langsung dan pemberian bantuan, yang dipersepsikan publik sebagai pemimpin yang responsif (Kurniawan, 2025).

Daya tarik konten tersebut tidak hanya terletak pada aktivitas yang ditampilkan, tetapi juga pada gaya komunikasi dan pendekatan visual yang digunakan. Konten Dedi Mulyadi mengadopsi format menyerupai *reality show* dengan alur yang terstruktur, namun sengaja terlihat *raw* atau tidak disensor, untuk menciptakan ilusi spontanitas dan keaslian. Penelitian terdahulu Setiawan (2025) menunjukkan Dedi Mulyadi mampu membentuk kedekatan emosional dan loyalitas publik terhadap konten Youtubenya karena memiliki gaya komunikasi yang personal, empatik, dan berbasis kultural.

Gaya komunikasi yang digunakan kerap menonjolkan nilai-nilai budaya. Dibuktikan dari penampilan Dedi Mulyadi yang memanfaatkan simbol budaya Sunda dengan selalu mengenakan pangsi dan iket untuk memperkuat identitas diri, sehingga ia dijuluki sebagai “Bapak Aing” diambil dari bahasa Sunda yang artinya bapak saya. Strategi yang ditampilkan tersebut, memperkuat konstruksi citra sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, di mana pesan politik disampaikan melalui simbol, emosi dan representasi visual (Awaludin, 2025).

Berdasarkan Survei Indikator (2026) menunjukkan bahwa 95,9% masyarakat Jawa Barat memberikan penilaian positif terhadap kinerjanya sebagai Gubernur yang terepresentasi melalui media sosial, terkhusus melalui kanal

Youtubenanya. Hal ini mengidentifikasi bahwa gaya komunikasi autentik Dedi Mulyadi mampu memperkuat legitimasi politiknya di mata publik (Anwar,2025).

Meskipun demikian, gaya komunikasi tersebut juga memunculkan berbagai macam kritik dari sudut pandang pejabat publik, seperti Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud yang menjuluki Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dan Anggota DPR RI, Andi Muwaiyah Ramly memberikan label “Gubernur Lambe Turah”. Kritik tersebut berkaitan dengan kecenderungan dramatisasi, potensi eksploitasi isu sosial, serta dominasi *one man show* yang terpusat pada dirinya sendiri daripada sistem dan lembaga (Azis, 2024).

Pemaknaan terhadap Dedi Mulyadi juga muncul di tingkat politisi lokal. Berdasarkan hasil pra wawancara dengan anggota DPRD Kota Payakumbuh, mayoritas mereka mengaku kerap melihat konten Dedi Mulyadi muncul di algoritma media sosial. Terdapat berbagai penilaian terhadap sosok Dedi Mulyadi, terkhusus dari gaya komunikasinya. Menurut TL dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gaya komunikasi Dedi Mulyadi adalah representasi pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini karena menunjukkan empati yang tinggi. Sebaliknya, menurut HJ dari Partai Amanat Nasional (PAN) kurang setuju dengan gaya komunikasi yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi karena dianggap terlalu dramatisasi konten.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa gaya komunikasi Dedi Mulyadi menimbulkan berbagai macam pemaknaan yang beragam. Meskipun berasal dari institusi yang sama, anggota DPRD Kota Payakumbuh memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang ditampilkan melalui kanal Youtube miliknya. Perbedaan pemaknaan tersebut mengidentifikasi bahwa

pesan yang sama tidak selalu diterima dan dimaknai secara seragam oleh khalayak.

Dalam penelitian ini, anggota DPRD Kota Payakumbuh dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka sedang melakukan optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi dengan melihat bagaimana konten-konten digital Dedi Mulyadi dikemas menjadi komunikasi politik yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat setiap harinya. Kondisi tersebut membuat anggota DPRD Kota Payakumbuh relevan untuk dikaji karena mereka tidak hanya menjadi khalayak yang mengonsumsi konten politik, tetapi juga merupakan aktor politik yang sedang menghadapi kebutuhan bagaimana menghadapi kebutuhan komunikasi digital dalam praktik politiknya sendiri.

Posisi tersebut sekaligus memberikan kredibilitas bagi anggota DPRD Kota Payakumbuh sebagai informan penelitian. Mereka memiliki pengalaman dalam menjalankan komunikasi politik, menyampaikan aspirasi masyarakat, membangun hubungan dengan konstituen, serta menyampaikan aktivitas kelembagaan kepada publik. Oleh karena itu, ketika memaknai gaya komunikasi Dedi Mulyadi, mereka dapat memberikan penilaian berdasarkan pengalaman sebagai sesama politisi, bukan semata-mata sebagai pengguna media sosial.

Penelitian ini memiliki pembaharuan karena sebagian besar studi sebelumnya menempatkan masyarakat umum sebagai subjek resepsi, seperti pada penelitian Oktavian (2025), Haris et al. (2024), dan Sujarwo (2025). Kajian secara khusus melihat bagaimana politisi memaknai konten dan gaya komunikasi politisi lain melalui media sosial masih terbatas. Padahal, dalam komunikasi politik digital, gaya komunikasi tidak hanya dinilai dari isi pesan, tetapi juga dari cara politisi

membangun makna dominan melalui gestur, ekspresi dan pola interaksi dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga video viral untuk dianalisis pada “Kang Dedi Mulyadi Channel” yang berjudul: “*Trotoar Dipenuhi Tanah, KDM Ngambek Minta Penggalian Dihentikan.*”, *KDM Bertemu Nenek Berusia 100 tahun, Masih Ke Sawah dan Rajin Berpuasa.*” dan *Menuju Rekonstruksi Gunung Padang, KDM Diserbu Warga.*” Video tersebut dipilih sebagai objek analisis karena menonjolkan narasi yang kerap dibangun oleh Dedi Mulyadi, yaitu berupa konten bantuan, interaksi dengan masyarakat dan tidak cepat sebagai pemimpin dalam menangani sebuah permasalahan di lapangan. Sehingga video yang dipilih oleh peneliti dapat representatif dalam menggambarkan gaya komunikasi Dedi Mulyadi.

Dalam menganalisis pemaknaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Resepsi Stuart Hall, *encoding* dan *decoding* (1980). *Encoding* adalah proses memberikan makna pada suatu kode dan *decoding* adalah proses memaknai pesan yang telah disampaikan oleh khalayak melalui media (McQuail, 2011). Khalayak pada penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang berperan dalam *decoding* gaya komunikasi Dedi Mulyadi di media sosial Youtube. Pada proses *encoding-decoding* terhadap pesan media, khalayak memiliki tiga pola pemikiran yaitu *Dominant Hegemonic Position*, *Negotiated Position*, dan *Oppositional Position* (Morrisan, 2013). Dengan adanya tiga klasifikasi pola pemikiran dalam proses *encoding-decoding* tersebut dapat menggambarkan eksplorasi pemaknaan anggota DPRD tentang gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang tidak hanya sebagai bentuk penyampaian informasi, tetapi juga menjadi simbol strategi politik dan interaksi sosial melalui media digital. Peneliti menuangkan ide tersebut dan tertarik

untuk melakukan penelitian terkait hal ini dengan judul **Resepsi Anggota DPRD Kota Payakumbuh Terhadap Gaya Komunikasi Dedi Mulyadi di Media Sosial Youtube.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu menganalisis bagaimana resepsi (penerimaan, pemaknaan, dan respon) anggota DPRD Kota Payakumbuh terhadap gaya komunikasi Dedi Mulyadi di media sosial Youtube.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan pemaknaan anggota DPRD Kota Payakumbuh terhadap gaya komunikasi Dedi Mulyadi di Youtube
2. Menjelaskan posisi anggota DPRD Kota Payakumbuh terhadap gaya komunikasi Dedi Mulyadi di Youtube.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi baik dalam manfaat teoritis maupun praktis bagi para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bidang kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks teori resepsi (*reception theory*) dan komunikasi politik. Temuan penelitian ini juga

dapat menjadi referensi akademis dalam mengkaji hubungan antara viralitas gaya komunikasi tokoh politik dan resepsi tokoh politik lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi dan wawasan bagi politisi, khususnya anggota DPRD dan pejabat publik lainnya, tentang pentingnya gaya komunikasi yang humanis, otentik, dan berbasis media sosial. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau inspirasi dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan media digital saat ini.

